



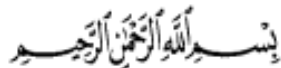
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor :0777/Pdt.G/2013/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum IWAN SETIAWAN,SH Advokad, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 20 Oktober 2013 (terlampir) dan memilih domisili di Kantor kuasa beralamat Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dan telah terdaftar dengan No. 927/K/XI/2013/PA.Bjr. Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor register : 777/Pdt.G/2013/PA.Bjr tanggal 01 Nopember 2013, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tertanggal 07 Agustus 2003;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 9 tahun 4 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, belum mempunyai rumah sendiri, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa Pengugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya maupun kepada pemuka Agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi Februari 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri sedangkan tergugat pulang kerumah orang tuanya selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat prinsipal yang didampingi kuasa hukumnya telah datang meng hadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 22 Nopember 2013, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara secara sepihak kepada Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar, tanggal 7 Agustus 2003 telah dicocokkan dengan aslinya, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu tapi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena faktor ekonomi Tergugat tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal kepada Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus-menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat prinsipal dan keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali panggilan, dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1980 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau kerja, dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 tahun 8 bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1435 H. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. MUSTOFA KAMIL

Dra. ATIN HARTINI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara No. 777/Pdt.G/2013/PA.Bjr

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |
| 2. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)